

Optimalisasi Peran Gen Z sebagai Bonus Demografi dalam Mencapai Indonesia Emas

Wisam Zuhdi Surya Nusantara¹, Hasan Basri², Yunie Rahayu³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Jambi

wisamnusantara@gmail.com¹, hasan.stiemjbi@gmail.com², yunierahayu.2106@gmail.com³

ABSTRACT

The problem of economic development in Indonesia refers to the problem of the foundations of the national economy, the problem of education, the problem of job opportunities and the problem of the habits of generation Z. The aim of this research was to find a problem map among the four problems which form the background and solution to the problem. This research was carried out using qualitative research methods, using literature study techniques. The research results show that 1) Regarding the foundation of the national economy, Indonesia needs to strengthen the agrarian economic sector, which is the economic sector with the highest contribution to employment. 2) education issues, Indonesia needs to evaluate and improve the curriculum so that education can be achieved that educates and improves the quality of human resources in Indonesia. 3) Employment issues. There needs to be a policy in optimizing the use of agricultural land to increase employment in the primary sector, as well as providing equal opportunities for workers in other sectors. 4) Generation Z's problem is differences in ways of working, the government needs to support generation Z entrepreneurs with training and capital assistance.

Keywords : Development, Economy, Education, Generation Z, Jobs.

ABSTRAK

Akar permasalahan umum pembangunan di Indonesia mengacu pada masalah pondasi perekonomian nasional, pendidikan, peluang kerja dan persoalan kebiasaan generasi Z. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menguraikan akar masalah pembangunan sekaligus alternatif solusinya dengan metode penelitian kualitatif studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Masalah pondasi ekonomi nasional, Indonesia perlu untuk memperkuat sektor ekonomi agraris yang merupakan sektor ekonomi dengan kontribusi penyerapan tenaga kerja paling tinggi. 2) Masalah pendidikan, Indonesia perlu melakukan evaluasi dan perbaikan kurikulum sehingga tercapai pendidikan yang mencerdaskan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. 3) Masalah lapangan pekerjaan, Perlu adanya kebijakan dalam optimalisasi penggunaan lahan pertanian untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor primer, serta memberikan kesempatan yang sama untuk para pekerja dalam sektor lainnya. 4) Masalah generasi Z yakni perbedaan cara kerja, pemerintah perlu mendukung wirausaha generasi Z dengan pelatihan dan bantuan modal.

Kata kunci : Ekonomi, Generasi Z, Pekerjaan, Pembangunan, Pendidikan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk besar, data tahun 2024 mencatat bahwa penduduk di Indonesia berjumlah setidaknya 283.487.931 jiwa. Penduduk terbanyak berada di Provinsi Jawa barat dengan persentase sebesar 17,88% dari jumlah total penduduk di Indonesia, lalu diikuti oleh provinsi Jawa Timur sebesar 14,85%, Jawa tengah 13,46%, Sumatera Utara, 5,543% Banten 4,41% dan Jakarta 3,79%, lalu di ikuti oleh provinsi lainnya yang ada di Indonesia (Kedaton, 2024). Catatan ini

menandakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar pada peringkat keempat di dunia serta negara dengan penduduk terbanyak Asia Tenggara atau mencapai 40,9% dari total populasi Asia Tenggara (D. L. Putri and Nugroho 2024). Tingkat kepadatan penduduk di Indonesia mencapai 156 jiwa per - Km² dengan persentase populasi tinggal di perkotaan sebesar 59% dan rata-rata masyarakat Indonesia saat ini berusia 30 tahun (Badan Pusat Statistik 2022).

Jumlah penduduk Indonesia tidak hanya dinilai sebagai besarnya populasi yang ada sebagai warga negara, tetapi sebagai variabel penyokong pembangunan. Dalam pertumbuhan masyarakat pada sebuah negara, tentu bersinggungan dengan aktivitas yang dilakukan termasuk dalam kegiatan ekonomi maupun politik. Pada akhirnya, hal ini menjadi bagian sangat penting untuk memahami bahwa penduduk tidak hanya sebatas angka statistik, tetapi juga berpengaruh pada aktivitas-aktivitas pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan. Oleh karena, eksistensi jumlah penduduk Indonesia harus dicermati dari dua sisi, sebagai peluang atau justru menjadi hambatan. Perlu dipahami pula, meski masyarakat Indonesia saat ini berada pada usia rata-rata 30 tahun, tetapi jumlah usia yang ada di bawahnya masih cukup besar.

Usia 30 tahun yang menjadi usia rata-rata di Indonesia kini disebut sebagai Z. Istilah generasi Z diberikan terhadap kelompok generasi yang cukup muda, yakni lahir antara tahun 1995 sampai dengan 2010 (Putra 2016). Istilah generasi Z diberikan untuk mengadakan suatu periode kelahiran generasi, seperti generasi Silent yang lahir tahun 1928 sampai 1945, Generasi "Boomer" yang lahir tahun 1946 sampai 1946, Generasi "X" yang lahir tahun 1965 sampai 1980, Generasi "Millennials atau Y" yang lahir tahun 1980-1995, Generasi "Z", dan terakhir generasi "alpha" yang lahir pasca 2010. Generasi Z lahir di tengah pesatnya pertumbuhan teknologi. Masa lahir generasi Z terjadi saat transisi teknologi yang privat menjadi masal, dimana teknologi yang dahulu sulit diakses menjadi lebih mudah (LinggaSekar Arum, Amira Zahra, and Nickyta Arcindy Duha 2023). Kondisi tersebut menjadi istimewa bagi generasi Z karena berada di antara terjadinya perubahan yang tentunya akan mengalami masa transisi yang begitu besar.

Generasi Z di Indonesia berada dalam persentase sebesar 27,94% dari total populasi atau sebesar 79,93 juta penduduk berada dalam kelompok generasi Z (Kumparan 2023). Jumlah tersebut memiliki potensi signifikan dalam membentuk perubahan dan kekuatan besar dimasa depan. Sumber data BPS menyebutkan bahwa Generasi Z merupakan kelompok yang mendominasi penduduk di Indonesia, kemudian diikuti kelompok generasi milenial, atau generasi X, baby Boomer, Post Gen Z dan Pre Boomer. Generasi ini berada dalam usia muda hingga remaja awal. Oleh karena, kondisi ini memungkinkan Indonesia memiliki bonus demografi cukup besar di tahun berikutnya sekaligus diprediksi mencapai puncak pada 2045 (Rainer 2023).

Bonus demografi merupakan sebuah fase saat jumlah penduduk yang berada usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) memiliki jumlah lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non produktif, di bawah 5 tahun dan di atas 64 tahun (Sutikno 2020). Bonus demografi memungkinkan suatu negara untuk menciptakan pembangunan demi kemajuan sebuah negara. Dengan adanya kondisi dimana lebih banyak usia produktif, maka negara berpotensi lebih cepat untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, industri,

bisnis dan usaha. sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Termasuk Indonesia yang diperkirakan memiliki bonus demografi yang tinggi pada tahun 2020 sampai 2035, sehingga pada tahun-tahun tersebut perlu dilakukan suatu pengelolaan yang tepat untuk menciptakan kemajuan negara dan juga perkembangan masyarakat yang lebih baik (Sutikno 2020).

Alasan utama bonus demografi sebagai faktor pendorong terjadinya kemajuan sebuah negara adalah dampak sosial dan ekonomi yang diberikan oleh bonus demografi tersebut. Penduduk yang berada pada usia produktif dapat menanggung penduduk non produktif sehingga perlu diketahui bahwa jumlah penduduk produktif yang tinggi dibandingkan penduduk non produktif akan memberikan pengaruh yang positif dan mendukung kemajuan negara. Diperkirakan setiap 100 penduduk produktif menanggung 44 penduduk non produktif (Sutikno 2020). Sebagaimana laporan PBB, kondisi bonus demografi di Indonesia akan mendorong dampak positif sehingga angka ketergantungan penduduk terus menurun, setidaknya sampai tahun 2040.

Kesadaran atas bonus demografi yang dimiliki negara Indonesia harus dimanfaatkan dengan baik untuk menciptakan perubahan dan kemajuan. Salah satu faktor kunci besar terhadap pemanfaatan bonus demografi adalah pemerintahan (Aprianti, Suyanto, and Choirudin 2022). Sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam merencanakan dan merealisasikan berbagai rencana terkait dengan kebijakan dan pembangunan, pemerintah harus mengambil langkah yang tepat dalam memanfaatkan kondisi demografi. Pemerataan pembangunan ekonomi dan sosial adalah salah satu agenda penting untuk mewujudkan masyarakat yang kesejahteraan sehingga terjadi perubahan yang positif dan mendorong kemajuan negara.

Pemanfaatan bonus demografi menuju Indonesia emas tahun 2045 bukanlah hal yang mustahil ketika terjadi sinergitas yang kuat antara pemerintahan, masyarakat dan negara (Kementerian PPN / Bappenas 2019). Namun, terdapat beberapa masalah krusial yang harus diselesaikan terlebih dahulu baik oleh pemerintah, masyarakat maupun pelaku ekonomi. Masalah-masalah yang dimaksud ini menyangkut mengenai kondisi ekonomi dan sosial negara, kondisi pendidikan maupun kondisi perubahan kebiasaan akibat dari pertumbuhan dan perkembangan teknologi. Terdapat masalah paling mendasar yang dihadapi negara Indonesia saat ini, yakni mengenai pondasi negara dan kondisi perubahan yang terjadi pada masyarakat, dengan terlalu cepatnya perubahan yang terjadi pada konteks masyarakat Indonesia.

Permasalahan pertama mengenai pondasi negara yang berkaitan dengan perspektif ekonomi, dimana sebuah negara yang maju ditandai dengan terjadinya 3 fase pembangunan, yakni negara agraris, manufaktur, dan terakhir adalah jasa (Amalia 2022). Dalam ketiga fase tersebut, manusia memiliki peran yang sangat penting seperti fase pertama manusia berperan sebagai food gathering, fase kedua berperan sebagai producing dan fase ketiga berperan dalam perundingan. peran-peran tersebut tentunya juga melibatkan kemampuan manusia, seperti fase pertama yakni agresi meskipun berada dalam kondisi negara yang belum maju, terapi sebuah negara setidaknya harus mampu bertahan, kedua adalah feses manufaktur dimana masyarakat lebih giat dan kreatif, ketiga

adalah fase jasa dimana manusia akan berperan untuk menjalankan teknologi dalam mengoptimalkan fungsi sebagai peran yang lebih terampil.

Persoalan utama yang harus dihadapi terkait dengan pondasi negara dengan perspektif ekonomi pembangunan di Indonesia dalam masyarakat Indonesia terlalu cepat melangkah sehingga terjadi kondisi yang tidak runtut dalam tiga fase yang umumnya terjadi pada negara maju. Negara Indonesia terlalu cepat beranjak dalam fase-fase yang harus dilalui, sehingga menimbulkan kondisi negara yang tidak kuat dan rentan akan terjadinya permasalahan mendasar. Seperti fase agraris yang belum sepenuhnya mencapai tujuan swasembada pangan, fase manufaktur yang hanya berfokus pada industri dengan kapasitas terbesar tanpa pertimbangan aspek produksi lainnya, termasuk fase jasa yang belum sesuai dengan kemampuan sumber daya manusianya. Oleh karena, Indonesia belum siap mencapai tujuan yang tepat.

Permasalahan selanjutnya yakni mengenai pendidikan yang ada di Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Tujuan Sistem Pendidikan Nasional, bahwa yang dimaksud dengan pendidikan nasional sebagai usaha yang sadar dan terencana untuk membangun [potensi peserta didik. Dalam ketentuan yang lebih lanjut sistem pendidikan nasional disusun untuk mendorong perkembangan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat, membanguna potensio peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkahlah mulai, berilmu, cakap, sehat, mandiri, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Mendorong perkembangan kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan keterampilan serta akhlak mulia yang dibutuhkan peserta di, masyarakat, bangsa dan negara. Terakhir adalah membantu peserta didik menjadi manusia yang cinta tanah air dan memiliki rasa kebangsaan.

Persoalan pendidikan di Indonesia sendiri, meskipun telah diselenggarakan sistem pendidikan nasional adalah, pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan kurikulum yang valid untuk merealisasikan sebuah pembelajaran yang tepat sasaran. Kurikulum yang diselenggarakan belum mengatasi masalah-masalah mendasar dalam pendidikan di Indonesia seperti rendahnya literasi baca masyarakat, kurikulum yang cenderung berfokus pada hal teknis, serta anggaran pendidikan yang belum spesifik untuk membangun pendidikan. Bisa dinyatakan masalah kurikulum pendidikan di Indonesia hanya sebatas formalitas, yang belum menyasar pada pemerataan pembelajaran dan dampak yang signifikan terhadap lulusan-lulusan sekolah maupun perguruan tinggi. Sehingga sekolah hanya sebatas formalitas, untuk memperoleh status lulus dan ijazah semata.

Masalah ketiga yang harus dihadapi mengenai masalah lapangan pekerjaan, meskipun Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan penduduk terbesar di Asia Tenggara, dengan tingkat penduduk yang produktif lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk non produktif namun permasalahan lapangan pekerjaan memang menjadi masalah yang sangat sering dihadapi oleh warga negara Indonesia, Kerap kali masyarakat harus berhadapan dengan kriteria dan ketentuan lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuannya, serta minimnya lapangan pekerjaan pada beberapa daerah

pinggiran dan pedesaan. Lapangan pekerjaan yang hanya tersentral pada daerah-daerah atau kota-kota tertentu menciptakan kesenjangan pertumbuhan daerah yang pada akhirnya mempersempit perjuangan masyarakat untuk bekerja (McKinsey & Company, 2019).

Saat ini ketiga masalah tersebut harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang berada dalam kelompok generasi Z Selain hambatan yang terjadi karena faktor lingkungan dan kebijakan, masalah lainnya juga muncul akibat kebiasaan yang terjadi pada generasi Z. menurut data BPS tahun 2023 pencatatan sebanyak 9,9 juta penduduk yang berada dalam kelompok generasi Z dalam kondisi menganggur atau tidak memiliki pekerjaan, terlebih untuk usia 20 sampai 24 tahun (Badan Pusat Statistik, 2024). Masalah ini muncul akibat faktor lingkungan maupun kebijakan dan faktor internal dalam diri generasi Z seperti sikap ; malas, etika yang tidak baik, terlalu banyak tuntutan gaji dari sebuah pekerjaan yang diminati, tidak relevannya kemampuan dan permintaan haji, dan lebih senang pada kondisi nyaman tanpa ada dorongan untuk penciptaan perubahan. Sehingga dalam kelompok generasi Z sendiri juga mengalami masalah yang lebih kompleks untuk menciptakan kemajuan bangsa.

Berdasarkan realita yang dijelaskan pada uraian diatas, maka permasalahan yang sangat kompleks harus dihadapi oleh negara Indonesia sebelum benar-benar mencapai Generasi Emas, yang tentunya akan menciptakan perubahan besar terhadap negara Indonesia. Permasalahan ini tentunya menjadi bagian paling krusial untuk diselesaikan, dengan mmeprimbangkan kondisi-kondisi dan juga mengembangkan perspektif yang tepat mengenai ekonomi dan pembangunan. Masalah yang sangat kompleks saat ini pada dasarnya saling terhubung sehingga dapat proses mencari solusinya dibutuhkan pemetaan yang tepat. Pemetaan ini akan kemudahan bagaimana proses mencari solusi sehingga dapat mendukung penyelesaian masalah dengan tindakan yang terintegrasi. Oleh karena itu tujuan penulisan artikel ini adalah mendeskripsikan Pemetaan Masalah dalam Menciptakan Solusi dengan Memanfaatkan Bonus Demografi untuk Menuju Indonesia Emas.

Penulisan artikel ini berfokus pada empat masalah utama yang harus dihadapi, khususnya terkait sumber daya manusia atau aspek bonus demografi. Masalah tersebut terbagi ke dalam, masalah pondasi negara, masalah pendidikan terkait dengan kurikulum, masalah lapangan pekerjaan, serta masalah internal kelompok generasi Z. Keempat masalah ini akan dihubungkan satu dengan lainnya sehingga setiap solusi yang diberikan saling berkesinambungan guna memperoleh wawasan baru mengenai hubungan antara pembangunan, pendidikan, pekerjaan, dan faktor internal generasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang dapat didefinisikan sebagai sebuah penelitian yang berfokus terhadap proses interpretasi fenomena alamiah yang rasional dalam memahami kejadian yang sebenarnya (Purba 2021). Jenis penelitian ini sebagai metode untuk mengumpulkan pengalaman individu intropelksi, interview, cerita kehidupan, observasi, teks visual, interaksi yang terjadi ditengah masyarakat (Denzin and Lincoln 2005). Hasil penelitian kualitatif berbentuk data

deskriptif teks dari objek atau subjek yang dipelajari (Taylor, Bogdan, and DeVault 1998). Pendekatan yang digunakan adalah analisis induktif tematik, yakni proses menganalisis data yang bersifat tekstual, lalu melakukan nafsul struktur dan tema isi. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yakni proses pengumpulan data sekunder yang berasal dari data-data yang telah ada pada literas baik itu berbentuk karya ilmiah artikel berita, buu maupun teks-teks yang mendukung hasil penelitian. Analisis data dilakukan dengan analisis siklus kualitatif (Purba, 2021) yang menunjukkan bahwa dalam proses penelitian kualitatif terbagi kedalam tiga siklus yakni siklus esaibn, siklus pengumpulan informasi dan siklus analisis. Sklus desain adalah siklus yang betujuan untuk merumalsah masalah dan tujuan penelitian, peninjauan lietas, pengembangan kerangka dan pemilihan metode pengumpulan data. Siklus pengumpulan data, merupakan proses perancangan instrumen penelitian dan pengumpulan data penelitian, terakhir adalah siklus analisis yang dilakukan dengan proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu mendasar mengenai generasi Emas tahun 2045 terkait dengan pembangunan ekonomi di Indonesia adalah mengenai kesiapan yang dilaksanakan oleh Negara Indonesia. Saat ini sebagian besar demografi di Indonesia didominasi oleh masyarakat usia produktif. Kondisi ini tentunya harus dimanfaatkan dengan baik sehingga tercapai generasi emas di tahun 2045 nantinya. Namun untuk mencapai kondisi dimana negara Indonesia dapat dinyatakan dalam perekonomian yang tumbuh pesat, dan masuk kedalam kategori negara maju, untuk saat ini dibutuhkan upaya-upaya pengentasan masalah mendasar yang masih terjadi di Indonesia. Terjadi beberapa permasalahan utama seperti yang akan diuraikan pada bagian pembahasan ini.

A. Pondasi Negara dalam Sektor Ekonomi

Masalah pertama yang harus dihadapi oleh negara Indonesia adalah pondasi dalam sektor perekonomian di Indonesia. Perlu diketahui bahwa suatu negara mungkin bertumpu pada suatu sektor ekonomi. Indonesia sendiri sebelumnya dikenal sebagai negara agraris, karena memiliki jumlah lahan pertanian yang cukup luas, dan sektor ekonomi masyarakat yang berbasis pada pertanian dan peternakan. Sektor agraris ini menjadi sektor paling banyak dikenangkan oleh amsyarakat lokal khususnya di wilayah pedesaan. Namun persoalannya sektor agraris sendiri tidak dapat menjadi tujuan utama perekonomian masyarakat Indonesia saat ini. Sektor agraris mengalami penurunan jumlah tenaga kerja yang diakibatkan oleh masyarakat yang mengalami minat yang menurut terhadap sektor ekonomi ini. Penelitian dari (Oktafiani, Sitohang, and Saleh 2021) menunjukkan bahwa faktor sulitnya regenerasi petani muda adalah akses terhadap lahan yang sangat sulit dengan semakin sempitnya lahan pertanian, terjadinya kemiskinan, faktor keluarga maupun pendidikan yang tidak mengarahkan pada ekonomi agraris.

Akibat dari menurunnya ekonomi agraris di Indonesia berdampak pada penurunan produktivitas yang pada akhirnya untuk beberapa pangan utama seperti beras dan kedelai harus melakukan impor produk dari luar negeri (Hasanah 2022). Kondisi

dimana negara Indonesia tidak mampu untuk memenuhi pangannya sendiri, membuat Indonesia belum layak untuk menjadi negara agraris yang swasembada pangan. Selain itu dampak berkelanjutan adalah peralihan sektor ekonomi yang terjadi di Indonesia, dimana pertumbuhan ekonomi agraris juga dipengaruhi oleh ekonomi manufaktur. Peralihan lahan menunjukkan adanya perubahan sektor ekonomi. Namun sektor manufaktur juga belum bisa menjamin kegiatan ekonomi masyarakat (Harahap et al. 2023). Banyak masyarakat produktif yang masih menganggur, meskipun sektor manufaktur telah tumbuh di berbagai wilayah Indonesia.

Sektor jasa di Indonesia masih berkembang dan belum mendominasi kegiatan ekonomi masyarakat (Armelly, Rusdi, and Pasaribu 2021). Sektor jasa ini ditandai dengan pemanfaatan dan adaptasi teknologi untuk mendukung kegiatan ekonomi. Sebagian besar masyarakat generasi Z berusaha untuk menjalankan bisnis pada sektor jasa, yang ditandai dengan banyaknya peluang untuk mengembangkan industri digital, dan juga jasa komersial digital melalui media. Namun persoalannya masih cukup rawan dan rentan bisnis semacam ini belum diatur secara spesifik oleh negara, sehingga juga dapat merugikan bagi pihak-pihak yang belum memahami secara besar mengenai sektor jasa dengan pemanfaatan teknologi.

Isu pondasi negara terkait perekonomian ini hendaknya dapat dipahami sebagai isu utama yang harus dicari solusinya. Meskipun saat ini permintaan nasional telah banyak menjalankan program, tetapi belum seluruhnya dapat menjamin realisasi fungsi ekonomi yang sebenarnya. Salah satu solusinya adalah dengan membentuk koperasi produksi yang menjamin distribusi produk ke konsumen (Schwettmann, 2016). Koperasi ini tentunya harus berfokus pada sektor ekonomi tumpuan utama dan kebutuhan masyarakat seperti bahan pangan maupun produk pangan turunan, yang pada akhirnya dapat mendukung kegiatan ekonomi dengan baik. Koperasi dapat dibentuk mulai dari tingkat nasional hingga daerah, yang dapat menyerap setidaknya 50% produksi pangan di Indonesia, sehingga menjamin bahwa pangan di Indonesia terpenuhi.

Sebagai contoh konkret dalam pembangunan ekonomi agraris, melalui pembentukan koperasi dalam menjamin keberlangsungan produksi dan distribusinya dengan baik adalah negara di wilayah Eropa seperti Negara Slovenia, negara ini memiliki koperasi-koperasi pertanian yang bertanggung jawab terhadap 72% produksi susu, 79% dari produksi sampai, 45% dari produksi gandum, dan 77% dari produksi kentang. Sementara itu di Negara Amerika Serikat, meskipun tidak dikenal sebagai negara agraris, tetapi negara ini juga menjalankan fungsi koperasi, 1 dari 4 orang atau sekitar 25% dari total populasi di negara Amerika Serikat merupakan anggota koperasi. Dengan jumlah koperasi lebih dari 30 dengan penghasilan tahun lebih dari 1 miliar dolar AS. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembentukan koperasi yang berkomitmen terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat menjadi salah satu solusi yang relevan dengan masalah perekonomian di Indonesia.

B. Masalah Pendidikan di Indonesia

Pendidikan merupakan aspek yang sangat menentukan capaian pembangunan suatu negara. Masalah pendidikan yang harus dihadapi oleh negara Indonesia saat ini

dalah relevansi kurikulum dengan tujuan yang hendak dicapai. Kurikulum yang diselenggarakan hendaknya sesuai dengan tujuan dari pendidikan yang dilaksanakan. Sehingga ketika siswa telah lulus menjadi angkatan kerja produktif telah siap dengan aktivitas kerja maupun siap untuk membuka usaha. Namun masalahnya pendidikan di Indonesia belum menunjukkan hasil yang signifikan antara tujuan pendidikan dengan kualitas masyarakat, khususnya dalam pembangunan ekonomi. Data tahun 2023 yang dikutip dari Website CNBC Indonesia menunjukkan bahwa pekerja di Indonesia sampai tahun 2023 masih didominasi oleh lulusan sekolah dasar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dathun 2023 menunjukkan bahwa 39,76% pekerja merupakan tamatan sekolah dasar, Pesentase ini mengalami peningkatan dibandingkan Februari tahun 2021 sebesar 37,41% da tahun 2022 sebesar 39,10%. Sedangkan untuk lulusan SMA berada pada posisi kedua dengan persentase sebesar 19,18% dan lulusan SMP yakni sebesar 18,24%. Sedangkan diurutan paling bawah ada lulusan diploma yang berada pada angka 2,20% dan lulusan sarha, megister dan doktor berada pada angka 9,31%. Sedangkan untuk sekolah kejuruan (SMK) mengalami persentase peurunan dari tahun 2022 sebesar 9,92% menjadi 9,31% pada tahun 2023, atau mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,64% (W. F. I. Putri 2023). Selain itu masalah yang muncul adalah pekerjaan yang tidak sesuai keahlian pada lulusan Sarjana, ditunjukkan dengan data bahwa 80% mahasiswa bekerja tidak sesuai jurusan pendidikannya.

Berdasarkan masalah yang terjadi tersebut, persoalan yang dihadapi dalam bidang pendidikan berimbang secara langsung pada aktivitas ekonomi yang digeluti oleh masyarakat angkatan kerja produktif. Tidak sesuainya bidang pekerjaan dengan pendidikan yang telah ditempuh menjadi salah satu persoalan utama seringnya terjadi pengangguran. Selain itu penurunan penyerapan tenaga kerja untuk SMK tentu menjadi persoalan yang harus dipahami mengenai pendidikan yang diberikan. Kurikulum yang disusun harusnya tepat sasaran dengan maksud mencerdaskan dan menyiapkan generasi muda yang siap kerja, siap berinovasi serta membrikan kontribusi positif pada negara. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah kurikulum pendidikan yang mampu menjamin keseimbangan antara pengembangan daya kreatif dan peningkatan kecerdasan. Selain itu perlu adanya penekanan mengenai capaian belajar yang tidak hanya sebatas nilai angka, tetapi juga evaluasi yang dapat memberikan gambaran bahwa siswa dalam pembelajaran telah menguasai materi atau mata pelajaran, baik secara teori maupun dalam aktivitas praktis.

Solusi yang dapat ditawarkan dalam mengatasi masalah pendidikan yang sama adalah menyusun kurikulum elaborasi yang mengkombinasikan antara kegiatan belajar teori dan praktek secara langsung. Dalam hal ini kurikulum yang dimaksud adalah memberikan gambaran kepada siswa tentang masyarakat dan dunia kerja. Sistem ini dapat diadaptasi dari sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh negara Nordik seperti Finlandia, yang memiliki kurikulum dalam pemerataan akses pendidikan dan kebebasan kreatifitas siswa (Cahyani 2023) dan juga negara Jerman yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari teori dalam ruang kelas, lalu memahaminya secara parktik ditengah masyarakat atau dalam ruang kerja (Mukhlis 2020). Kurikulum pendidikan semacam ini tidak hanya berfokus pada capaian teori berdasarkan nilai tes saja, tetapi

juga mengevaluasi siswa, apakah telah memahami sebuah materi pembelajaran, atau perlu adanya pemahaman lebih lanjut, sehingga setelah lulus akan diproleh lulusan yang berkualitas dan siap untuk terjun ke masyarakat baik memulai usaha maupun terlibat dalam pekerjaan.

C. Sempitnya lapangan Pekerjaan

Pada dasarnya masalah pengangguran akibat sempitnya lapangan pekerjaan juga didorong oleh faktor pendidikan. Meskipun pendidikan sendiri memiliki tujuan utama untuk mencerdasakan, tetapi tujuannya adalah membentuk masyarakat yang paham atas kesejahteraan dan kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Sehingga terdapat korelasi yang sangat penting antara pendidikan dan kesempatan dalam bekerja. Seperti data mengenai lulusan yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki sebagai berikut:

Menunjukkan bahwa lulusan sekolah dasar masih mendominasi. Berdasarkan data dari (Zulfiyandi et al. 2021) pekerja lulusan sekolah dasar paling banyak pada pekerja kasar seperti buruh bangunan, buruh tani, nelayan dan bahwa petani. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat pekerjaan-pekerjaan yang menyerap tenag kerja lulusan sekolah dasar, namun pada sektor yang cukup sempit. Pertanian dan perkebunan merupakan sektor ekonomi yang membantu penyerapan tenaga kerja, namun msalahnya lahan pertanian di Indonesia semakin menyempit, selain itu untuk sektor perkebunan akses terhadap lahan juga cukup sulit (Gultom and Harianto 2022). Sehingga hal ini mengakibatkan terjadi penyempitan kesempatan tenaga kerja, baik dari lulusan sekolah dasar maupun dari lulusan yang lebih tinggi. Selain itu tidak stabilnya harga-harga untuk sektor pertanian dan perkebunan juga menimbulkn terjadinya pengurangan tenaga kerja yang akhirnya meningkatkan angka pengangguran. Ditambahlagi tenaga kerja yang tidak berpengalaman pada bidang lain sehingga tidak dapat menari kerja pada sektor ekonomi lainnya.

Solusi yang coba diberikan dalam mengatasi masalah sempitnya lapangan pekerjaan adalah dengan memberikan kebijakan mengenai tenaga kerja dan mengoptimalkan sektor ekonomi yang mendukung penyerapan tenaga kerja secara merata. Salah satunya adalah dengan meningkatkan akses yang sama terhadap lahan pertanian dan perkebunan, melalui kebijakan nasional maupun daerah. Rencana strategis yang harus dikedepankan dalam memecahkan persoalan ini seharusnya sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam mencapai negara agraris yang seutuhnya dengan swasembada pangan. Pemerintah harus memulai kebijakan yang tegas mengenai harga-harga produksi primer pada sektor pertanian dan perkebunan, sehingga tidak menimbulkan kerugian produksi untuk menjamin tenaga kerja pada sektor tersebut mendapatkan kesejahteraan. Selain itu membuka peluang kerjasama dengan sistem koperasi antara pemrintahan, petani, pekerja dan pihak swasta seperti perusahaan atau industri produk turunan.

D. Masalah Generasi Z

Generasi Z merupakan kelompok masyarakat yang saat ini paling mendominasi pada angkatan kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa bonus demografi terjadi pada Generasi Z. Namun permasalahannya terdapat kebiasaan generasi Z yang cenderung berbeda dengan generasi sebelumnya (Putra 2016b) dan juga berdampak pada aktivitas ekonomi yang harus dilakukan. Generasi Z merupakan generasi yang tumbuh bersama perkembangan teknologi internet dan smartphone sebagai penunjangnya. Terdapat berbagai aktivitas dan kebiasaan yang cenderung berbeda dengan generasi sebelumnya. Menurut (Wahyuni et al. 2022) terdapat ciri sikap generasi Z yang dapat diidentifikasi seperti, Kecenderungan bersikap praktis dan instan, memiliki sikap bebas dan percaya diri tinggi, memiliki keinginan untuk ikau, ambisi yang cukup besar, menyukai sesuatu yang detail serta berpindah digital dalam akses informasi. Beberapa sikap akan menimbulkan perbedaan persepsi dengan generasi-generasi sebelumnya, sehingga menciptakan kondisi yang tidak nyaman dan istilah perbedaan generasi.

Masalah perbedaan generasi pada Generasi Z dapat menimbulkan rasa malas untuk bekerja bahkan memiliki harga diri tinggi untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana hasil penelitian dari Pohan and Rialdy (2024) yang menunjukkan bahwa Generasi Z saat ini menampilkan minat yang kuat terhadap wirausaha. Sebagian besar Generasi Z justru tertarik dengan bisnis yang dibuat sendiri, dengan berbagai motivasi dan tujuan. Hasil ini ditunjukkan dengan data yang menunjukkan bahwa generasi Z berada pada urutan ketiga sebagai pelaku usaha mikro, kecil dan menengah setelah generasi X dan generasi Y. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendorong kecenderungan generasi Z dalam berwirausaha adalah faktor sosial, faktor pribadi dan faktor psikologis.

Berdasarkan hasil analisis dan temuan mengenai fakta tentang generasi Z, solusi yang coba ditawarkan adalah memberikan kesempatan yang sama pada generasi Z untuk mengakses bidang bisnis, melalui berbagai pelatihan, dan juga dukungan modal untuk pengusaha muda. Kebijakan modal dapat dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki oleh pemohon modal. Dengan strategi semacam ini tentunya akan memudahkan generasi Z untuk berkontribusi dalam sektor ekonomi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dari berbagai macam sektor usaha. Selain itu dengan solusi yang strategis dan tepat sasaran melalui pemberian pelatihan dan modal yang terarah dan diawasi oleh Lembaga pemrintahan, setidaknya memastikan keadilan dalam aksesibilitas peluang bisnis yang sama bagi pelaku usaha muda yakni generasi Z.

Dalam upaya mempersiapkan Indonesia untuk mencapai "Generasi Emas" pada tahun 2045, perbaikan dalam sektor pendidikan sangat krusial. Berdasarkan analisis terhadap berbagai isu mendasar yang telah diuraikan, berikut adalah beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia:

1. Perbaikan Kurikulum Pendidikan

- Kurikulum Terintegrasi: Kurikulum pendidikan harus mengintegrasikan teori dan praktik. Ini dapat dilakukan dengan mengadopsi model dari negara-negara seperti

Finlandia dan Jerman, yang menekankan pada keseimbangan antara pembelajaran di kelas dan pengalaman praktis di dunia nyata.

- Kurikulum Berbasis Kompetensi: Kurikulum harus dirancang untuk mengembangkan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Ini mencakup peningkatan pelatihan keterampilan teknis dan keterampilan lunak yang dibutuhkan dalam dunia kerja.

2. Perbaikan Sektor Pendidikan dan Kualitas Pengajaran

- Pelatihan Guru: Melakukan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengajarkan kurikulum yang diperbarui.

- Evaluasi Berbasis Kompetensi: Mengembangkan sistem evaluasi yang tidak hanya berfokus pada hasil ujian tetapi juga pada penguasaan keterampilan praktis dan pemahaman materi secara menyeluruh.

3. Perbaikan Regulasi Pendidikan

- Penyesuaian Regulasi: Menyusun dan menerapkan regulasi yang mendukung pengembangan kurikulum yang relevan dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan pasar kerja.

- Incentif untuk Sekolah dan Pendidikan Vokasi: Memberikan insentif kepada sekolah dan lembaga pendidikan vokasi yang berhasil meningkatkan keterampilan siswa dan tingkat penyerapan kerja mereka.

4. Peningkatan Akses dan Kesetaraan dalam Pendidikan

- Pendidikan Inklusif: Meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil dan bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai dan mendukung pembelajaran jarak jauh.

- Beasiswa dan Dukungan Finansial: Menyediakan beasiswa dan dukungan finansial bagi siswa berprestasi yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka hingga tingkat yang lebih tinggi.

5. Pengembangan dan Kolaborasi dengan Sektor Industri

- Kemitraan Industri-Pendidikan: Mengembangkan kemitraan antara lembaga pendidikan dan sektor industri untuk memastikan bahwa kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan industri.

- Program Magang dan Praktek: Memperluas kesempatan magang dan praktik kerja untuk siswa agar mereka memperoleh pengalaman langsung dan siap untuk memasuki pasar kerja.

6. Pemanfaatan Teknologi

- Teknologi dalam Pendidikan: Mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan interaktivitas dan aksesibilitas materi pendidikan.

- Platform Pendidikan Online: Mengembangkan platform pendidikan online untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dan akses ke materi pendidikan berkualitas bagi semua siswa.

7. Peningkatan Kualitas dan Relevansi Pendidikan Tinggi

- Penyesuaian Program Studi: Menyesuaikan program studi di perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi.

- Dukungan untuk Riset dan Inovasi: Meningkatkan dukungan untuk riset dan inovasi di perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan berinovasi dan berwirausaha.

Dengan melaksanakan langkah-langkah di atas, Indonesia dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara signifikan, yang pada gilirannya akan memperkuat pondasi ekonomi negara dan mempersiapkan angkatan kerja yang terampil dan siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Ini akan mendukung upaya Indonesia untuk mencapai status negara maju dan memanfaatkan bonus demografi untuk kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.

E. Strategi Penanganan Masalah

Permasalahan penyerapan tenaga kerja di Indonesia perlu diatasi dengan segera karena beberapa alasan mendesak yang berdampak langsung pada kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial negara. Pertama, masalah pengangguran dan ketidakcocokan keterampilan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Jika jumlah tenaga kerja yang tidak terserap dalam lapangan kerja produktif terus meningkat, hal ini akan menyebabkan pemborosan potensi manusia dan sumber daya. Tanpa adanya lapangan kerja yang memadai, individu tidak dapat berkontribusi secara optimal pada ekonomi, yang pada gilirannya dapat menghambat inovasi dan produktivitas. Kedua, bonus demografi yang dimiliki Indonesia adalah kesempatan langka. Dengan populasi usia produktif yang semakin besar, Indonesia memiliki potensi untuk memacu pertumbuhan ekonomi jika dapat memanfaatkan tenaga kerja ini dengan baik. Namun, jika tantangan dalam penyerapan tenaga kerja tidak diatasi, kesempatan ini bisa menjadi bumerang, yang berpotensi meningkatkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Ketiga, kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dan kebutuhan pasar dapat memperburuk masalah pengangguran. Pendidikan dan pelatihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri menyebabkan ketidakcocokan antara keterampilan tenaga kerja dan permintaan pasar. Hal ini dapat menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi dan menghambat pertumbuhan sektor-sektor yang membutuhkan keahlian khusus. Keempat, peningkatan ketimpangan sosial dan ekonomi adalah risiko besar jika masalah penyerapan tenaga kerja tidak ditangani. Pengangguran tinggi dan kurangnya peluang kerja dapat memperburuk ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan. Ini berpotensi menciptakan ketegangan sosial dan menurunkan kualitas hidup bagi banyak individu. Terakhir, kualitas hidup dan kestabilan sosial tergantung pada kemampuan ekonomi negara untuk memberikan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Tanpa upaya serius untuk mengatasi masalah ini, Indonesia mungkin mengalami stagnasi dalam kualitas hidup, kesehatan masyarakat, dan stabilitas sosial, yang semuanya berpengaruh pada kemajuan jangka panjang negara. Secara keseluruhan, mengatasi masalah penyerapan tenaga kerja adalah krusial untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memanfaatkan bonus demografi secara optimal, dan menciptakan stabilitas sosial. Ini merupakan langkah strategis yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih besar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Mengatasi masalah penyerapan tenaga kerja di Indonesia dalam konteks bonus demografi dapat dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh, menggabungkan strategi investasi dan kebijakan moneter seperti penurunan suku bunga. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperbesar penyerapan tenaga kerja:

1. Investasi dalam Infrastruktur dan Sektor Produktif

- Pembangunan Infrastruktur: Investasi besar dalam infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan transportasi publik akan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mendukung sektor ekonomi lainnya. Infrastruktur yang baik juga akan menarik investor asing dan domestik, meningkatkan peluang kerja.
- Sektor Agraris: Mengingat sektor agraris memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, pemerintah harus memperkuat sektor ini dengan investasi dalam teknologi pertanian, pelatihan bagi petani, dan program agribisnis. Hal ini akan meningkatkan produktivitas dan menciptakan pekerjaan di sektor pertanian.
- Sektor Industri dan Teknologi: Mendorong investasi dalam industri manufaktur dan teknologi akan menciptakan pekerjaan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Dukungan untuk sektor teknologi dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan memperluas peluang kerja di bidang-bidang baru seperti digitalisasi dan e-commerce.

2. Penurunan Suku Bunga dan Kebijakan Moneter

- Mempercepat Pembiayaan Bisnis: Penurunan suku bunga dapat membuat kredit lebih terjangkau bagi bisnis kecil dan menengah (UKM). Hal ini akan mendorong ekspansi bisnis, inovasi, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kredit yang lebih murah memungkinkan perusahaan untuk berinvestasi dalam perluasan kapasitas produksi, pembelian peralatan baru, dan rekrutmen tenaga kerja.
- Meningkatkan Investasi Swasta: Suku bunga rendah juga dapat merangsang investasi swasta dengan menurunkan biaya pinjaman. Ini akan mengarah pada lebih banyak proyek bisnis, yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak pekerjaan.
- Kebijakan Moneter dan Inflasi: Penurunan suku bunga harus diimbangi dengan kebijakan yang mencegah inflasi berlebihan, yang dapat merusak daya beli dan mengurangi manfaat dari penurunan suku bunga. Regulasi yang hati-hati terhadap inflasi akan menjaga kestabilan ekonomi dan lingkungan kerja yang sehat.

3. Pengembangan Keterampilan dan Pendidikan

- Reformasi Kurikulum: Menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja dapat mengurangi kesenjangan keterampilan. Pendidikan harus berorientasi pada keterampilan yang dibutuhkan oleh industri, termasuk teknologi dan keahlian praktis.
- Pelatihan dan Sertifikasi: Menyediakan pelatihan keterampilan kerja yang relevan dan sertifikasi profesional akan membantu pekerja siap pakai untuk pasar kerja. Program pelatihan harus mencakup berbagai bidang, termasuk keterampilan teknis dan soft skills.

4. Dukungan untuk Wirausaha dan Startups

- Fasilitas Pendukung Wirausaha: Menyediakan akses ke modal awal, pelatihan, dan bimbingan bagi wirausaha generasi Z dan startup dapat meningkatkan peluang mereka untuk sukses. Program inkubator bisnis dan akselerator dapat memberikan dukungan yang diperlukan untuk memulai dan mengembangkan usaha.

- Regulasi dan Kemudahan Berusaha: Memperbaiki iklim usaha dengan mengurangi birokrasi dan mempermudah proses pendirian bisnis akan memotivasi lebih banyak individu untuk berwirausaha dan menciptakan pekerjaan.

5. Kemitraan antara Pemerintah dan Swasta

- Kemitraan Publik-Swasta: Membangun kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam berbagai proyek, seperti pembangunan infrastruktur dan program pelatihan, dapat memperluas dampak investasi dan menciptakan lebih banyak peluang kerja.
- Insentif untuk Investasi: Memberikan insentif pajak atau subsidi untuk investasi di sektor-sektor yang padat karya akan memotivasi perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan merekrut lebih banyak tenaga kerja.

Dengan kombinasi strategi investasi yang efektif, kebijakan moneter yang mendukung, reformasi pendidikan, dan dukungan untuk kewirausahaan, Indonesia dapat memperbesar penyerapan tenaga kerja dan memanfaatkan bonus demografi untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menuju "Generasi Emas" pada tahun 2045.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dari masalah utama yang harus dihadapi dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia, maka dapat di telusuri bahwa sebenarnya dari keempat aspek ini saling berkaitan. Pertama yakni mengenai penguatan pondasi sektor ekonomi, Indonesia perlu memperkuat basis agraris terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, serta menjamin aktivitas ekonomian dapat berjalan dengan baik. Setelah Indonesia dapat mencapai swasembada pangan, maka dapat mengelola aktivitas ekonomi pada sektor manufaktur dan jasa. Kemampuan dalam pengelolaan sumber daya yang ada di Indonesia tentunya harus dilaksanakan dengan tepat melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, salah satunya dengan memperbaiki kurikulum pendidikan di Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada capaian nilai akademik tetapi juga memahami praktiknya. Dengan perbaikan terhadap sistem pendidikan maka dapat tercapai lulusan yang berkualitas yang siap bekerja maupun membuka lapangan pekerjaan untuk mengatasi masalah sempitnya lapangan pekerjaan. Terakhir dalam melaksanakan strategi tersebut maka Generasi Z merupakan generasi yang berperan cukup penting dalam menggerakan perekonomian masyarakat. Dalam peta pemecahan masalah pembangunan ekonomi nasional, pemerintah berperan untuk menetapkan kebijakan dalam menjamin realisasi solusi secara adil dan berkelanjutan sehingga tercapai generasi emas 2045.

Untuk mencapai "Generasi Emas" pada tahun 2045 dan status negara maju, Indonesia harus fokus pada peningkatan sektor pendidikan. Hal ini melibatkan perbaikan kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan teori dan praktik, serta peningkatan kualitas pengajaran melalui pelatihan guru dan evaluasi berbasis kompetensi. Regulasi pendidikan perlu disesuaikan untuk mendukung pengembangan kurikulum yang relevan dan memberikan insentif bagi institusi pendidikan yang berhasil meningkatkan keterampilan siswa. Selain itu, perluasan akses pendidikan, terutama di daerah terpencil

dan bagi kelompok kurang beruntung, harus didorong melalui dukungan finansial dan penyediaan fasilitas yang memadai. Pengembangan kemitraan antara lembaga pendidikan dan sektor industri, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, akan meningkatkan relevansi pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk pasar kerja. Peningkatan program studi di perguruan tinggi dan dukungan untuk riset dan inovasi juga penting untuk mempersiapkan lulusan yang siap berinovasi dan berwirausaha. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat memperkuat pondasi ekonomi dan memanfaatkan bonus demografi untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Mengatasi permasalahan penyerapan tenaga kerja di Indonesia adalah hal yang sangat mendesak dan penting untuk masa depan negara. Dengan bonus demografi yang signifikan, Indonesia memiliki kesempatan langka untuk memacu pertumbuhan ekonomi jika mampu menyerap dan memanfaatkan tenaga kerja yang tersedia dengan efektif. Kegagalan dalam menangani masalah ini dapat mengakibatkan pengangguran yang tinggi, ketidakcocokan keterampilan, dan ketimpangan sosial yang memperburuk kualitas hidup dan stabilitas sosial. Untuk memanfaatkan potensi ini, Indonesia harus fokus pada investasi infrastruktur dan sektor produktif, serta mengadopsi kebijakan moneter yang mendukung, seperti penurunan suku bunga, untuk merangsang investasi dan ekspansi bisnis. Selain itu, reformasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan sangat penting untuk memastikan tenaga kerja terampil sesuai dengan kebutuhan pasar. Dukungan untuk wirausaha dan kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta juga akan memperluas peluang kerja dan meningkatkan kualitas lapangan pekerjaan. Secara keseluruhan, menangani masalah penyerapan tenaga kerja secara efektif tidak hanya akan memperkuat pertumbuhan ekonomi tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial dan menciptakan stabilitas jangka panjang. Langkah-langkah strategis ini diperlukan untuk memastikan Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih besar dan memanfaatkan bonus demografi untuk kemajuan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2024. "Not in Employment, Education, and Training/NEET Pada Gen Z." Badan Pusat Statistik. May 28, 2024.
- Amalia, Fitri. 2022. Ekonomi Pembangunan. Bandung: Widha Bakti Persada.
- Aprianti, Dian Irma, Suyanto, and Sugeng Choirudin. 2022. "Tantangan Bonus Demografi Bagi Pemerintah." Nusantara Innovation Journal 1 (1): 10–18.
- Armelly, Muhammad Rusdi, and Esti Pasaribu. 2021. "Analisis Sektor Unggulan Perekonomian Indonesia: Model Input Output." SOROT: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial 16 (2): 119–34.
- Badan Pusat Statistik. 2022. "Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin, INDONESIA, 2022." Website Badan Pusat Statistik. 2022.
- Cahyani, Laila Nur. 2023. "Sistem Pendidikan Finlandia: Membangun Kemandirian Dan Semangat Belajar Siswa." Journal of Contemporary Issues in Primary Education (JCIPE) 1 (2): 55–61.
- Denzin, Norman K., and Yvonna S. Lincoln. 2005. Hand Book of Qualitative Research. London: Sage Publications.

- Gultom, Ferdi, and Sugeng Harianto. 2022. "Lunturnya Sektor Pertanian Di Perkotaan." *Jurnal Analisa Sosiologi* 11 (1): 49–72.
- Harahap, Nabila Ananda Putri, Ferry Al Qadri, Desi Indah Yani Harahap, Situmorang Marisah, and Sari Wulandari. 2023. "Analisis Perkembangan Industri Manufaktur Indonesia." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4 (6): 14441450.
- Hasanah, Lutfianasari. 2022. "Analisis Faktor-Faktor Pengaruh Terjadinya Impor Beras Di Indonesia Setelah Swasembada Pangan." *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 1 (2): 57–72.
- Kedaton, Kirana Ratu Sekar. 2024. "Jumlah Penduduk Indonesia 2024, Populasi Terbesar Di Jawa Barat." *Detikedu*. June 24, 2024.
- Kementerian PPN / Bappenas. 2019. "Indonesia 2045 Berdaulat, Maju, Adil, Dan Makmur." Jakarta.
- Kumparan. 2023. "Demografi Generasi Z Di Indonesia Beserta Karakteristiknya." *Kumparan.Com*. July 31, 2023.
- LinggaSekar Arum, Amira Zahrani, and Nickyta Arcindy Duha. 2023. "Karakteristik Generasi Z Dan Kesiapannya Dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030." *Accounting Student Research Journal* 2 (1): 59–72.
- McKinsey & Company. 2019. *The Future of Work in Indonesia*. Jakarta: McKinsey & Company.
- Mukhlis. 2020. "Studi Komparatif Pendidikan Dan Bahasa Indonesia-Jerman Di Era Global." In *Literasi Generasi Layar Sentuh*, 785–98. Semarang.
- Oktafiani, Irin, Marya Yenita Sitohang, and Rahmat Saleh. 2021. "Sulitnya Regenerasi Petani Pada Kelompok Generasi Muda." *Jurnal Studi Pemuda* 10 (1): 1–17.
- Pohan, Mukmin, and Novien Rialdy. 2024. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Gen Z Dalam Menentukan Bisnis Yang Diminati Sebagai Usaha Kecil." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2 (6): 295–302.
- Purba, Elidawaty. 2021. *Metode Penelitian Ekonomi*. Pematangsiantar: Yayasan Kita Menulis.,
- Putra, Yanuar Surya. 2016a. "Theoretical Review : Teori Perbedaan Generasi." *Among Makarti* 9 (18): 123–34.
- Putri, Diva Lufiana, and Rizal Setyo Nugroho. 2024. "20 Negara Penduduk Terbanyak Di Dunia 2024, Indonesia Nomor Berapa? Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul '20 Negara Penduduk Terbanyak Di Dunia 2024, Indonesia Nomor Berapa?'" *Kompas.Com*. April 25, 2024.
- Putri, Widya Finola Ifani. 2023. "Data: Pekerja Di Indonesia Mayoritas Lulusan SD." *CNBC Indonesia*. May 17, 2023.
- Rainer, Pierre. 2023. "Sensus BPS: Saat Ini Indonesia Didominasi Oleh Gen Z." *GoodStats*. August 24, 2023.
- Schwettmann, Jurgen. 2016. *The Role of Cooperatives in Achieving the Sustainable Development Goals*. Geneva: International Labour Organization.
- Sutikno, Achmad Nur. 2020. "Bonus Demografi Di Indonesia." *Visioner* 12 (2): 421–38.
- Taylor, Steven J., Robert Bogdan, and Marjorie L. DeVault. 1998. *Introduction to Qualitative Research Methods : A. Guide Book and Resources*. New York: John Wiley & Sons.

As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal

Volume 3 Nomor 4 (2024) 2177 – 2193 E-ISSN 2962-1585

DOI: 10.56672/assyirkah.v3i4.369

- Wahyuni, Sri Fitri, Radiman Radiman, Jufrizen Jufrizen, Muhammad Shareza Hafiz, and Ade Gunawan. 2022. "Model Praktik Manajemen Keuangan Pribadi Berbasis Literasi Keuangan, Orientasi Masa Depan Dan Kecerdasan Spiritual Pada Generasi 'Y' Di Kota Medan." Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi 6 (2): 1529–39.
- Zulfiyandi, Franciscus Anton Wirawan, Nikhen Pratiwi Sekar Tanjung, Roselina Yolanda, and Devi Andrian. 2021. "Ketenagakerjaan Dalam Data Edisi 4 Tahun 2021." Jakarta.